

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Taiwan dengan Tiongkok merupakan hubungan antara dua negara yang rentan terhadap konflik. Hubungan dua negara tersebut dikenal dengan sebutan *Cross-Strait Relation*. Taiwan dan Tiongkok memiliki banyak perbedaan dalam berbagai aspek, mulai dari sistem ekonomi, sosial, dan politik yang terus berkembang hingga saat ini.¹ Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, kedua negara mempunyai hubungan kerja sama yang erat, dengan adanya organisasi *Mainland Affairs Council* (MAC) untuk menangani isu-isu mengenai perumusan dan implementasi kebijakan terhadap Tiongkok, *Straits Exchange Foundation* (SEF) yang dibentuk untuk mengatur kerja sama dan sebagai jembatan hubungan mereka.²

Dalam hubungan *Cross-Strait* terdapat hal-hal yang mempengaruhi kestabilan hubungan mereka, dari bagaimana keadaan sistem internasional, dan keadaan politik atau arah politik Taiwan terhadap Tiongkok dan sebaliknya.³

¹ Gildart, S. G. (2016, Maret). China-Taiwan Relations: A New Paradigm Between East Asian Countries in the 21st Century. *Bulletin of Faculty of Letters, Ferris University*, 29-56. hlm.43.

² *The Republic of China yearbook : Taiwan 2001*. (2001). Taiwan : Government Information Office, 2001.

³ Lin, W.-c. (2016, Januari). Taiwan Enters The Tsai Ing-Wen Era and The Impact on Cross-Strait Relations. *Analysis No. 293*, 1-12.

Perancangan kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok mendasar pada Konsensus 1992 yaitu pengakuan terhadap prinsip *One China* oleh kedua pihak dengan interpretasi menurut pandangannya masing-masing. Arah kebijakan Taiwan terhadap Tiongkok akan berpengaruh mengikuti bagaimana pandangan setiap partai yang memegang kuasa terhadap konsensus 1992.

Pada 1980an Taiwan mengalami fase demokratisasi pertama mereka dengan berdirinya partai oposisi *Democratic Progressive Party* (DPP) di tahun 1986 dan dicabutnya atau dihentikannya darurat militer oleh Chiang Ching-Kuo, anak dari Chiang Kai-Sek, menjadikan bagian dari fase demokratisasi Taiwan yang memungkinkan rakyatnya menikmati kebebasan berpendapat, berkumpul, dan kebebasan publikasi.⁴ Demokratisasi di Taiwan terus berkembang maju dibawah masa kekuasaan Lee Teng-Hui dan berhasil melaksanakan Pemilihan presiden umum presiden dan wakil presiden untuk pertama kali pada 1996.⁵ Dalam proses demokrasi, Taiwan menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi dan keamanan negara mereka. Tiongkok menjadi satu-satunya ancaman keamanan Taiwan mengikuti pernyataan reunifikasi dan keinginan Tiongkok untuk reunifikasi dan menghentikan kemerdekaan *de facto* Taiwan.⁶

Pada Pemilihan presiden 2016 dan 2020 partai DPP yang dipimpin oleh Tsai Ing-Wen berhasil terpilih sebagai presiden selama dua periode, melalui

⁴ *Ibid.*, hlm.32.

⁵ Eckholm, E. (2000, Maret 22). *Why a Victory in Taiwan Wasn't Enough for Some*. Retrieved November 18, 2021, from The New York Times: <https://www.nytimes.com/2000/03/22/world/why-a-victory-in-taiwan-wasn-t-enough-for-some.html>

⁶ Bush, R., & Hass, R. (n.d.). Democracy and Disorder: Taiwan's democracy and the China. *Foreign Policy at Brookings*.

kemanangan Tsai di tahun 2016 menjadi titik awal keberhasilan dari partai DPP untuk memenangkan kekuasaan Legislatif Yuan yang sebelumnya dipegang oleh partai KMT. Pada masa administrasi Tsai, Taiwan lebih mengedepankan pembangunan kerja sama dengan negara lain, terutama dengan negara-negara di Asia dengan maksud untuk mengurangi dependensi Taiwan terhadap Tiongkok dan memperbaiki pembangunan ekonomi Taiwan.⁷ Presiden Tsai menyatakan bahwa akan menolak reunifikasi dengan Tiongkok, tetapi tidak terlalu mengupayakan pelepasan diri seutuhnya dari Tiongkok karena hal tersebut dinilai terlalu beresiko, terlebih dalam pidatonya Tsai mengakhirinya dengan pernyataan hanya akan mempertahankan *status-quo* Taiwan.⁸

Tiongkok merespon kemenangan periode kedua Tsai bersama partai DPP dengan kecurigaan adanya kecurangan dalam proses Pemilihan presiden.⁹ Menyikapi usaha-usaha Taiwan di bawah rezim DPP untuk mengurangi dependensi mereka, serta pernyataan Tsai untuk terus menekankan kedaulatan Taiwan, Tiongkok tetap menegaskan bahwa hanya ada satu Tiongkok sebagai *Mainland* dan Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Dalam mempertahankan kedaulatannya, Tiongkok juga menerapkan prinsip *One China* dengan penekanan untuk negara lain yang ingin tetap menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok

⁷ Cai, P. (2016, Mei 24). *TAIWAN SEEKS 'INDEPENDENCE' IN POLITICS, TRADE*. Retrieved November 26, 2021, from Lowy Institute: <https://www.lowyinstitute.org/publications/taiwan-seeks-independence-politics-trade>

⁸ Ahzani, W. K. (2021). Upaya Pemerintahan Tsai Ing-Wen Melawan Tekanan One-China Principle pada Era XI Jinping. *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 2, no. 4, 2021, II(4), 552-564. doi:10.46799/jst.v2i4.252

⁹ MERICS. (2020, January 16). *Praised by the West, rejected by China: Tsai Ing-wen re-elected in Taiwan*. Retrieved from MERICS: Mercator Institute for China Studies: <https://merics.org/en/praised-west-rejected-china-tsai-ing-wen-re-elected-taiwan>

harus memandang Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.¹⁰

Sejak dilaksanakan Pemilihan presiden pertama untuk memilih presiden secara bebas dan langsung menjadi bentuk perkembangan demokratisasi bagi Taiwan, hal tersebut menimbulkan ketegangan antara dua negara. Dalam merespon, Tiongkok melakukan latihan gencatan militer di sekitar wilayah Taiwan dengan tujuan untuk menekan Taiwan agar tidak bergerak maju untuk mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.¹¹ Dengan memasuki masa pemerintahan Tsai selama dua periode, ketegangan antara dua negara mengalami eskalasi. Tiongkok tidak setuju dengan bagaimana pandangan Tsai terhadap Taiwan sebagai negara yang berdaulat dan independen, serta penolakan Konsensus 1992 yang mengarah pada agenda Taiwan untuk mendapatkan pengakuan *de jure*, menilai hal tersebut sebagai pelanggaran dari Konsensus 1992.

Pemilihan presiden menjadi hal yang penting bagi Taiwan, sebab bukan hanya mempertimbangkan isu-isu politik domestik saja, isu-isu *cross-strait* juga menjadi aspek pertimbangan penting dalam memilih presiden di Taiwan untuk menentukan masa depan Taiwan. Sebaliknya juga berlaku untuk Tiongkok, Pemilihan presiden di Taiwan juga menjadi hal yang penting bagi Tiongkok, dengan bagaimana kebijakan Taiwan terhadap prinsip *One China* yang akan berpengaruh pada masa depan proses reunifikasi Taiwan dengan Tiongkok.

¹⁰ Azzara, H. N., & Sholeh, B. (2022). A conflict between China and Taiwan: An analysis from a Realism Perspective. *Journal of Social Studies (JSS)*, XVII(2), 229-236. doi:10.21831/jss.v18i2.49721.229-236

¹¹ Gildart, loc. cit.

Dengan pentingnya pemilihan presiden untuk kedua negara, Tiongkok melakukan beberapa upaya untuk mencampuri dan mempengaruhi, dimulai pada saat digelarnya pemilihan presiden Taiwan di tahun 1996 untuk pertama kali Tiongkok meluncurkan serangan militer dengan rudal di semenanjung Taiwan dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pemilihan presiden.¹² Namun percobaan tersebut gagal, Taiwan berhasil melaksanakan pemilihan presiden dan melantik presiden yang dipilih secara bebas dan adil untuk pertama kalinya. Tiongkok perlahan merubah strategi mereka dalam mencampuri pemilihan presiden Taiwan dari cara yang langsung dengan pemanfaatan kekuatan militer, menjadi cara yang tidak langsung melalui propaganda Konsensus 1992 melalui outlet media pro-Tiongkok di Taiwan.¹³

Media propaganda saat pemilihan presiden Taiwan 2012 yang menekankan sektor ekonomi dan kebijakan pro-Tiongkok, dinilai efektif, dengan kemenangan partai KMT dibawah presiden Ma Ying-Jeou. KMT turut andil dalam keberhasilan propaganda Tiongkok, memanfaatkan propaganda tersebut menyampaikan akan terjadi resesi dan akan memberikan efek pada mata pencaharian apabila hubungan *cross-strait* memburuk.¹⁴ Sebaliknya, pada masa pemilihan presiden Taiwan di tahun 2016, strategi propaganda ini kurang efektif dalam mempengaruhi pemilih di Taiwan dengan kemenangan partai DPP yang memihak pro-independen sebagai

¹² Wu, J.-m., & Liao, M. (2021). China's Influence on Taiwan's Election: The impact of the "1992 Consensus" on presidential elections. *China's influence in the Centre-periphery Tug of War in Hong Kong, Taiwan and Indo-Pacific*, 137-190.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

partai yang berkuasa dan berhasil mengambil alih legislatif dibawah Tsai Ing-Wen.¹⁵

Menjelang pemilihan presiden Taiwan 2024 Tiongkok tetap berusaha mencampuri untuk mempengaruhi publik Taiwan agar tidak terus menekankan independensi. Salah satu strategi Tiongkok adalah untuk membentuk opini publik dan hasil pemilihan presiden. Selain melalui media propaganda Konsensus 1992, Tiongkok memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan strategi ini, memanipulasi fakta dan opini publik melalui disinformasi, *cyberattack*, dan upaya untuk mempengaruhi berita-berita yang ada di outlet media lokal.¹⁶ Menjelang pemilihan presiden, Tiongkok membuat bermacam narasi-narasi buruk terkait partai DPP dan calon presiden Lai Ching-Tei selaku perwakilan dari partai DPP. Tiongkok menggambarkan DPP sebagai partai yang gagal merugikan Taiwan, dengan menyebarkan narasi-narasi kegagalan DPP dalam pemerintahan dan menyebut mereka sebagai sumber ketegangan hubungan *cross-strait*, hingga pernyataan apabila memilih DPP akan berujung peperangan.¹⁷

Penulis merangkum tiga Penelitian terdahulu terkait upaya Tiongkok mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan, dan teori *sharp power*. Pertama, penelitian dengan judul "*China's sharp power through TikTok: A case study of how*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Kuehn, D. (2024, January 10). *Taiwan's 2024 Election: Between Chinese Interference and Democratic Resilience*. Retrieved from BTI Transformation Index: <https://blog.bti-project.org/2024/01/10/taiwans-2024-election-between-chinese-interference-and-democratic-resilience/>

¹⁷ Cole, J. M. (2024). *China's attempt to interfere with Taiwan's January 2024. a Macdonald Laurier Institute Publications. True North in Canadian Public Policy.*

China can use sharp power through TikTok” oleh Elina Melin di tahun 2020, penelitian ini membahas tentang bagaimana Tiongkok mengimplementasikan *sharp power* melalui aplikasi TikTok.¹⁸ Dalam penelitian Melin, dibahas kemungkinan kemampuan Tiongkok dalam mengimplementasikan *sharp power* melalui aplikasi TikTok dengan adanya manipulasi konten, bagaimana digunakannya penyensoran, dan bagaimana penyebaran propaganda bisa terjadi, serta adanya kecurigaan terkait hubungan antara TikTok dengan Tiongkok. Kedua, penelitian dengan judul, *“China’s influence on Taiwan’s elections: The impact of the “1992 Consensus” on presidential elections”* oleh Wu Jieh-min dan Liao Mei di tahun 2020, penelitian ini membahas terkait pengaruh Tiongkok pada pemilih di pemilihan presiden Taiwan tahun 2012 dan 2016. Yang ketiga, penelitian terkait teori *sharp power* dengan judul, *“What is Sharp Power?”* oleh Christopher Walker di tahun 2018 yang membahas tentang teori *sharp theory* mulai dari definisi hingga implementasinya.

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, ketiganya berhubungan dengan upaya Tiongkok untuk mempengaruhi dan *sharp power*. Setelah meninjau penelitian-penelitian diatas, penulis akan mencoba menjelaskan perbedaan dan kelebihan yang ada daripada penelitian terdahulu. Dua dari ketiga penelitian diatas membahas bagaimana upaya Tiongkok mempengaruhi opini publik di Taiwan, dan

¹⁸ Melin, E. (2020). China’s sharp power through TikTok: A case study of how China can use sharp power through TikTok. *Linnaeus University Sweden*.

bagaimana Tiongkok menggunakan *sharp power* melalui satu media, yaitu TikTok. Kedua penelitian tersebut hanya mengkaji upaya Tiongkok melalui media.

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya akan membahas implementasi *sharp power* Tiongkok melalui satu media saja, dan tidak secara umum. Penulis akan mengkaji implementasi *sharp power* melalui disinformasi, manipulasi, media sosial, dan *cyberattack* oleh Tiongkok terhadap Taiwan khususnya terhadap partai DPP dan dalam jangkauan waktu menjelang Pemilihan presiden Taiwan 2024. Pada penelitian-penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, masih membahas implementasi melalui TikTok tanpa penjelasan negara target yang spesifik, selain itu juga ada perbedaan jangkauan waktu penelitian dengan penelitian-penelitian tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **“Bagaimana implementasi *sharp power* Tiongkok dalam mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan 2024?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 jurusan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendeskripsikan bagaimana Tiongkok mengimplementasikan *sharp power* dalam upayanya untuk mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan di tahun 2024. Negara Tiongkok meluncurkan beberapa strategi untuk mencampuri dan mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan, salah satunya dengan penerapan *sharp power*.

Implementasi *sharp power* diharapkan bisa mempengaruhi negara sasaran, terutama dengan pembentukan opini publik. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi akademisi maupun praktisi dalam mengenal *sharp power* sebagai teori dalam studi Hubungan Internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Teori *Sharp Power*

Teori *Sharp Power* merupakan teori yang membahas tentang strategi kebijakan luar negeri yang berada di antara *soft power* dan *hard power*, pada teori *sharp power* menggunakan cara yang berbeda, bukan berupa persuasi seperti *soft power* dan juga bukan secara jelas menggunakan cara yang

koersif atau memaksa seperti *hard power*.¹⁹ Implementasi dari teori ini terutama ada pada negara otoriter untuk menggoyahkan demokrasi dan sebagai upaya untuk mengatasi ancaman demokratis dan kedaulatan negara dengan cara menginfluensi negara tersebut melalui cara yang bersifat manipulatif.²⁰

Terminology dari *sharp power* sendiri diambil dari implementasi teorinya yaitu “*pierce, penetrate, or perforate*” atau menembus, penetrasi, dan melubangi lingkungan politik dan informasi di negara sasaran.²¹ Pada negara demokrasi ada sektor-sektor yang dapat diakses secara terbuka yaitu *CAMP Vulnerability (culture, academic, media, and publication)* atau budaya, akademik, media, dan publikasi yang menjadikan titik sasaran *sharp power* dengan penggunaan manipulasi dan penyensoran.²² Negara otoriter berinisiatif meluaskan penyebaran budaya dan pengajaran bahasa mereka melalui universitas-universitas di negara-negara demokratis dan tertanam pada lembaga-lembaga Pendidikan, dalam prosesnya mereka berusaha untuk membatasi hingga menghentikan pihak universitas untuk membahas isu-isu sensitif terkait negara otoriter tersebut, serta adanya ketidakjelasan pada dana yang disalurkan dan kurikulum yang diberikan oleh negara otoriter kepada Lembaga dan universitas di negara demokratis. Dalam penyensoran, negara otoriter membatasi publikasi yang bertopik isu-

¹⁹ Walker, C., & Ludwig, J. (2017). From ‘Soft Power’ to ‘Sharp Power’: Rising Authoritarian Influence in the Democratic World. *National Endowment for Democracy*, 6-25.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Walker, C. (2018). What is Sharp Power? *Journal of Democracy*, 29(3), 9-23.

isu sensitif atau yang berpotensi memberikan dampak negatif untuk negara dengan mengintimidasi para akademisi, mereka juga akan melakukan penghapusan publikasi lama, untuk membentuk ulang sejarah negara mereka (*rebranding*).²³

Sharp power memungkinkan tercapainya tujuan untuk memperbesar perpecahan sosial di negara-negara sasaran, menghancurkan kepercayaan terhadap institusi, dan meningkatkan daya tarik retorika otoriter mendelegitimasi integritas lembaga-lembaga independen institusi, sistem politik, atau tipe rezim negara sasaran. Dengan teridentifikasi adanya asimetri pada keterbukaan antara masyarakat demokratis dengan otoriter, memungkinkan kekuasaan otoriter dapat memperoleh kekuasaan yang lebih.²⁴

Dalam penerapan *sharp power* bisa juga dipahami sebagai peperangan informasi (*information warfare*) menggunakan informasi palsu untuk tujuan yang buruk. Negara secara terampil akan berusaha mengesankan negara sasaran dengan memanipulasi informasi melalui penghancuran fakta-fakta yang sudah ada, lalu membentuk ulang menjadi informasi baru yang tidak sesuai atau palsu.²⁵ Selain melalui informasi, juga bisa dengan melakukan juga bisa dengan melakukan atau *cyberterrorism*.²⁶

²³ *Ibid.*

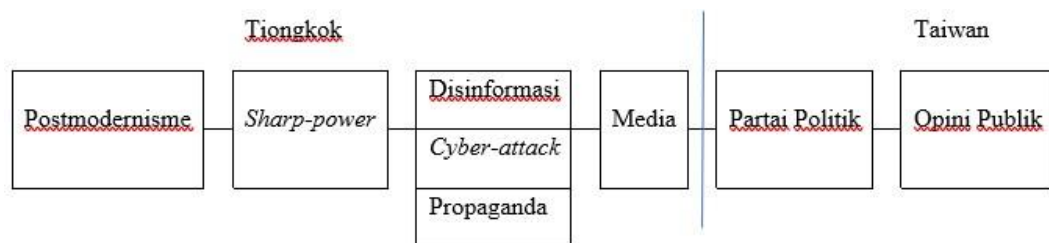
²⁴ Walker, C., & Ludwig, J. (2017). *Ibid.*

²⁵ Nye, J. S. (2018). How Sharp Power Threatens Soft Power: The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence. *Foreign Affairs*.

²⁶ Leonova, O. (2019). Sharp Power – the New Technology of Influence in a Global World. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*, 63(2), 21-28. doi:10.20542/0131-2227-2019-63-2-21-28

Cyberterrorism bisa dipahami sebagai penggunaan komputer atau teknologi untuk mengancam atau mengintimidasi dan menimbulkan ketakutan atau *terror* terhadap pihak yang ditargetkan, untuk mencapai hal tersebut dilakukan *cyberattack* yaitu serangan yang ditujukan pada keamanan siber (*cyber security*) negara sasaran. Memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang, *sharp power* menggunakan cara ini karena dalam operasinya akan sulit dideteksi dan tidak memerlukan biaya besar, namun di sisi lain upayanya efektif.²⁷

1.5 Sintesa Pemikiran



Bagan 1

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan kerangka pemikiran yang telah disusun untuk mencoba mengeksplorasi bagaimana implementasi *sharp power* sebagai bentuk kebijakan luar negeri negara Tiongkok. Kemudian akan menguraikan dan menjelaskan bagaimana negara Tiongkok menggunakan *sharp power*. Dalam upaya Tiongkok untuk mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan,

²⁷ *Ibid.*

negara Tiongkok melakukan disinformasi, propaganda, dan *cyberattack* terhadap Taiwan melalui media, berusaha untuk merubah pandangan publik terhadap partai politik di Taiwan. Dari upaya tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan dengan menggeser opini publik negara Taiwan.

1.6 Argumentasi Utama

Implementasi dari Strategi *sharp power* Tiongkok dilakukan dalam berbagai bentuk, Pertama, dengan dilakukannya disinformasi dan manipulasi menargetkan partai DPP melalui penyebaran banyaknya berita terkait partai DPP dan perwakilannya, dengan merubah fakta-fakta yang ada, membuat rumor, hingga penyebaran informasi palsu. Kedua, adanya propaganda oleh Tiongkok melalui *US Skepticism* atau Skeptisisme AS, dan propaganda Tiongkok sebagai protagonis. Ketiga, *cyberterrorism* melalui *cyberattack*. Taiwan mengalami kelonjakan pada aktivitas siber dengan target kantor pemerintahan, kepolisian, dan institusi finansial, memfokuskan pada komunikasi internal, laporan kepolisian, dan informasi terkait asuransi.

Dari tiga bentuk upaya Tiongkok dalam mengimplementasikan *sharp power*-nya, ketiganya sama-sama mempunyai satu tujuan yaitu, menggeser opini publik agar tidak terus mengupayakan independensi, namun sejalan atau mendukung reunifikasi dengan Tiongkok, menurunkan integritas serta delegitimasi partai DPP sebagai partai yang memegang kuasa pemerintahan Taiwan, dan menghentikan terpilihnya perwakilan partai DPP sebagai pemimpin negara Taiwan.

Efektivitas dari implementasi *sharp power* oleh negara Tiongkok dalam berupaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden Taiwan pada tahun 2024 kurang efektif, ditunjukkan dengan terpilihnya kembali presiden dari partai DPP yang merupakan partai oposisi bagi negara Tiongkok.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada pengumpulan data penelitian kualitatif merujuk pada data non-kuantitatif atau penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat menggunakan prosedur-prosedur numerik, namun menghasilkan penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang diamati.²⁸ Metode penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁹

Penulis dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan metode deskriptif berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan upaya Tiongkok dalam mempengaruhi Pemilihan presiden Taiwan sebagai implementasi *sharp power* Tiongkok.

²⁸ Lamont, C. K. (2015). *Research Methods in International Relations*. Sage Publication Ltd.

²⁹ Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Agar analisis dalam penelitian ini lebih fokus, penulis telah membatasi jangkauan penelitian mulai dari 2023-2024. Pemilihan jangka waktu tersebut beralasan karena pada 2023 adalah tepat dimulainya kampanye oleh partai dan calon presiden Taiwan menjelang pemilihan presiden Taiwan dan dibatasi hingga 2024 yaitu pada masa pemilihan presiden Taiwan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan data kualitatif yaitu data berupa verbal dan bukan berupa angka, dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan melakukan analisis dokumen yang sudah ada. Pengumpulan data dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen dari sumber yang terpercaya sebagai sumber informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang berbentuk catatan berupa tulisan seperti buku, jurnal, dokumen pribadi, dan laporan kegiatan atau peristiwa penting lainnya.³⁰ Data dokumentasi diperoleh melalui media cetak maupun elektronik (berbasis komputer dan ditransmisikan melalui Internet).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data terkait penelitian melalui media cetak dan media elektronik, penulis dalam penelitian ini

³⁰ Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

menggunakan teknik analisa *document analysis* atau Analisa dokumen. Teknik pengumpulan data ini memiliki prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, seperti metode analisis lainnya dalam penelitian kualitatif, analisis dokumen mengharuskan data diperiksa dan diinterpretasikan untuk memperoleh makna, memperoleh pemahaman, dan mengembangkan pengetahuan empiris.³¹ Prosedur dari teknik Analisa dokumen mencakup proses pencarian, pemilihan, penilaian (pemahaman), dan sintesis data yang terkandung dalam dokumen yang dijadikan sumber.³²

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I yaitu Pendahuluan, dalam bab ini berisikan penjelasan rancangan penelitian, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka berpikir dengan penjelasan landasan teori, argumen utama, dan metodologi penelitian dalam penelitian.

Bab II yang menjelaskan mengenai analisis implementasi *sharp power* melalui disinformasi, dan *cyberattack* melalui media oleh Tiongkok terhadap Taiwan sesuai dengan jangkauan penelitian (2023-2024).

Bab III yang menjelaskan mengenai analisis implementasi *sharp power* melalui propaganda, dan bagaimana respon publik Taiwan terhadap implementasi *sharp power* Tiongkok.

³¹ Corbin, J., & Strauss, A. (2008). *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (Vol. 3rd). Thousand Oaks, CA: Sage.

³² Bowen, G. (2009, August). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. doi:10.3316/QRJ0902027

Bab IV merupakan bab akhir atau penutup penulis menyajikan kesimpulan dan saran atas hasil yang didapatkan dari proses penelitian.